

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai perbandingan kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam pemanfaatan budaya populer untuk kepentingan ekonomi nasional, dapat disimpulkan bahwa kedua negara menunjukkan pola yang berbeda dalam membangun strategi. Korea Selatan menerapkan pendekatan yang lebih terintegrasi, di mana budaya populer dijadikan pilar utama dalam kebijakan ekonomi kreatif nasional. Hal ini terlihat dari keterlibatan penuh beberapa lembaga negara seperti MCST, KOCCA, dan KOFICE, serta dukungan langsung dari kepemimpinan nasional, baik Presiden Moon Jae-in maupun Yoon Suk-yeol, yang menegaskan budaya populer sebagai strategi diplomasi sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi. Strategi ini diperkuat dengan inovasi teknologi, insentif fiskal, promosi pariwisata *Hallyu*, dan penetrasi pasar global melalui kerja sama dengan platform internasional seperti Netflix.

Sementara itu, Jepang lebih menempatkan budaya populer sebagai instrumen soft power untuk menjaga citra internasional dan memperkuat diplomasi budaya, namun tidak secara eksplisit menjadikannya inti dari kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Lembaga seperti METI, MOFA, dan *Agency for Cultural Affairs* memang meluncurkan program seperti *Cool Japan Fund*, *Pop Culture Diplomacy*, dan *Content Industry Promotion Policy* tetapi sifatnya lebih simbolis dan pendukung. Pemulihan

ekonomi budaya populer di Jepang justru lebih banyak digerakkan oleh sektor swasta, seperti keberhasilan *Demon Slayer: Mugen Train*, industri dari *VTuber* seperti *Hololive* dan *Nijisanji* serta ekspansi manga dan anime oleh *Kadokawa*, *Shueisha*, *Kodansha*, dan *Shogakukan* melalui platform global seperti *Crunchyroll*, *Disney+*, dan *YouTube*.

Dari sisi perekonomian, Korea Selatan mencatat lonjakan signifikan pasca-pandemi dengan pertumbuhan pendapatan budaya populer rata-rata di atas 11% per tahun dari 2021 sampai 2023 sebelum stabil di 7,69% pada tahun 2024. Disisi lain Jepang juga mengalami pemulihan positif dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan budaya populer rata-rata sekitar 10% per tahun dari 2021 sampai 2023, sebelum stabil pada 6,7% di tahun 2024, meski hanya peningkatannya tidak terlalu tinggi tapi tetap stabil dan cenderung bergantung pada pasar serta inisiatif industri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Korea Selatan berhasil menciptakan model integrasi antara diplomasi budaya dan kepentingan ekonomi nasional, sedangkan Jepang tetap mempertahankan budaya populer sebagai simbol identitas global, namun kurang optimal dalam memanfaatkannya sebagai strategi ekonomi nasional yang terstruktur.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai perbandingan kebijakan Korea Selatan dan Jepang dalam pemanfaatan budaya populer untuk kepentingan ekonomi nasional, disarankan beberapa hal berikut. Penelitian ini telah menjelaskan bagaimana Korea Selatan secara terintegrasi menjadikan budaya populer sebagai

strategi utama pemulihan ekonomi, sedangkan Jepang lebih menekankannya pada aspek soft power dan diplomasi budaya. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk meneliti lebih lanjut mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi kedua negara, seperti risiko kejenuhan pasar global, persaingan dengan Tiongkok dan negara lain, serta keterbatasan dukungan kebijakan dari pemerintah Jepang yang membuat pemanfaatan budaya populer belum maksimal sebagai instrumen ekonomi.

Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari integrasi budaya populer terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif kedua negara. Pertanyaan yang perlu diteliti lebih dalam adalah apakah strategi Korea Selatan mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi secara berkelanjutan, ataukah hanya efektif dalam jangka pendek, serta apakah pendekatan Jepang yang lebih simbolis justru memberi stabilitas yang lebih tahan lama. Disarankan pula agar dilakukan studi perbandingan dengan negara lain seperti Tiongkok atau Amerika Serikat untuk memahami bagaimana konteks politik, ekonomi, dan budaya memengaruhi efektivitas pemanfaatan budaya populer dalam kebijakan luar negeri dan strategi ekonomi nasional.